

## Review Artikel : Perencanaan dan Pengadaan Obat Berdasarkan Katalog Elektronik Permenkes No. 5 Tahun 2019

Andi Permana<sup>1</sup>, Alisya Nabila<sup>2</sup>, Intan Nurlaili Izzah<sup>3</sup>, Nisa Nur Azizah<sup>4</sup>, Selviani Eka Suci<sup>5</sup>, Tita Ruhdiana<sup>6</sup>, Nia Yuniarsih<sup>7</sup>

<sup>1,2,3,4,5,6</sup> Fakultas Farmasi, Universitas Buana Perjuangan Karawang  
Email : [fm19.titaruhdiana@mhs.ubpkarawang.ac.id](mailto:fm19.titaruhdiana@mhs.ubpkarawang.ac.id)

### Abstrak

Katalog elektronik merupakan suatu sistem informasi berbasis elektronik yang terdapat daftar, jenis, spesifikasi teknis, dan harga barang tertentu dari berbagai penyedia barang atau jasa dengan menggunakan metode pembelian secara elektronik atau bisa disebut *E-Purchasing* yang dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua penyedia barang dan jasa yang terdaftar pada sistem elektronik. Tujuan dari digunakannya *E-Purchasing* untuk menjamin transparansi atau keterbukaan, efektif dan efisien dalam memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan yang dapat dipertanggung jawabkan. Dilakukannya review artikel ini yaitu untuk mengetahui pelayanan kefarmasian perencanaan, pengelolaan, serta penerimaan obat berdasarkan katalog elektronik serta mengetahui hambatan dalam penggunaan e-katalog. Hasil dari review artikel ini adalah penggunaan e-katalog menyebabkan sebanyak 21% jenis obat Formularium Nasional tidak berhasil diadakan melalui e-katalog karena penggunaan e-katalog masih di ragukan.

**Kata Kunci** : *katalog elektronik, perencanaan, pengadaan, penerimaan*

### Abstract

An electronic catalog is an electronic-based information system that contains lists, types, technical specifications, and prices of certain goods from various providers of goods or services using the electronic purchasing method or can be called *E-Purchasing* which is carried out openly and can be followed by all providers of goods. and services registered in the electronic system. The purpose of using *E-Purchasing* is to ensure transparency or openness, effectiveness and efficiency in meeting the needs of health services that can be accounted for. This article was reviewed to find out the planning, management and acceptance of pharmaceutical services based on electronic catalogs and to find out the barriers to using e-catalogs. The results of this article review are the use of e-catalogs causing as many as 21% of the types of drugs in the National Formulary to be unsuccessfully procured through e-catalogs because the use of e-catalogs is still in doubt.

**Keywords** : *electronic catalogs, planning, procurement, receiving*

### PENDAHULUAN

Instalasi farmasi merupakan unit pelaksanaan fungsional yang menyelenggarakan seluruh kegiatan pelayanan medis. Pelayanan kefarmasian merupakan pelayanan langsung dan bertanggung jawab yang berkaitan dengan obat kepada pasien, yang tujuannya adalah untuk mencapai hasil yang dapat diandalkan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. Pelayanan kefarmasian terbagi menjadi pengelolaan obat atau bahan medis habis pakai dan pelayanan farmasi klinik (Permenkes, 2016). Pelayanan kefarmasian harus

mampu menjamin ketersediaan obat yang aman dan bermutu. Pemilihan obat didasarkan pada formularium dan non formularium dengan menggunakan pola konsumsi maupun gabungan dari pola konsumsi dengan melihat penyakit yang terbanyak diderita (Permenkes, 2016).

Pengelolaan pengadaan obat harus berdasarkan katalog elektronik atau *E-Catalogue* yang bertujuan untuk menjamin transparansi atau keterbukaan, efektif dan efisien dalam memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan yang dapat dipertanggung jawabkan. Katalog elektronik merupakan suatu sistem informasi berbasis elektronik yang terdapat daftar, jenis, spesifikasi teknis, dan harga barang tertentu dari berbagai penyedia barang atau jasa dengan menggunakan metode pembelian secara elektronik atau bisa disebut *E-Purchasing* yang dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua penyedia barang dan jasa yang terdaftar pada sistem elektronik (Permenkes, 2014).

Terdapat beberapa manfaat pada pengadaan obat berbasis elektronik yakni dengan mengurangi waktu pemesanan, pembayaran sederhana, memperluas pasokan, mengurangi dokumen, tidak terjadinya pemesanan, pengurangan persediaan, meningkatkan pelayanan, menghemat waktu, mengurangi biaya transaksi dan meningkatkan perencanaan (Calipinar dan Soysal, 2012). Adapun kekurangan dari pengadaan obat berbasis elektronik adalah pemesanan yang terlalu sedikit yang akan menyebabkan terjadinya stockout ketika permintaan barang tidak terpenuhi (Nugroho, 2012).

## **METODE**

Metode yang digunakan dalam penyusunan review artikel adalah metode study pustaka, yaitu metode yang berisi teori-teori yang relevan dengan masalah yang berkaitan dengan penelitian atau artikel. Pembahasan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu data sekunder yang diperoleh dari data base google scholar dan Pubmed. Adapun kata kunci yang dicari dalam penelitian ini adalah Perencanaan dan Pengadaan Obat Berdasarkan Katalog Elektronik, E katalog, dan Permenkes No. 5 Tahun 2019. Dalam penelitian ini, dilakukan pencarian jurnal penelitian yang dipublikasikan di internet dalam jangka waktu 10 tahun terakhir dari tahun 2012-2022.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Perencanaan Obat**

Perencanaan dalam pengadaan obat berdasarkan Permenkes Nomor 5 Tahun 2019 telah dilakukan dengan baik. Pelaksanaan akan berjalan dengan lancar setelah adanya perencanaan yang matang dan baik. Perencanaan merupakan proses-proses yang penting dari semua fungsi manajemen sebab tanpa perencanaan (Planning) fungsi pengorganisasian, pengontrolan maupun pengarahan tidak akan dapat berjalan (Muhammad, 2017)

Pengelolaan sediaan farmasi adalah suatu siklus kegiatan, dimulai dari Pemilihan, Perencanaan Kebutuhan, Pengadaan, Penerimaan, Penyimpanan, Pendistribusian, Pemusnahan dan Penarikan, Pengendalian, Administrasi. Obat adalah upaya pemenuhan kebutuhan obat sesuai dengan jenis, jumlah dan mutu yang telah direncanakan melalui Pembelian, Produksi/pembuatan sediaan farmasi, dan sumbangan/droping/ hibah.

Proses perencanaan kebutuhan obat RS dilaksanakan oleh Instalasi Farmasi, dibutuhkan beberapa jenis data sebagai input, data-data tersebut antara lain: data serapan obat tahun lalu, data 10 besar penyakit RS, harga e-katalog/harga terakhir, stok terakhir, serta usulan layanan baru jika ada. Kemudian penanggung jawab Logistik melakukan perhitungan kebutuhan menggunakan metode konsumsi dengan mempertimbangkan morbiditas. Proses ini akan menghasilkan Usulan Perencanaan Obat, yang berisi informasi kebutuhan jenis, jumlah dan harga obat untuk tahun depan. Kemudian usulan ini akan ditelaah oleh

bagian penunjang dan sarana, lalu disampaikan ke bagian anggaran untuk proses pengalokasian anggaran. Kemudian setelah alokasi anggaran disetujui, dikirimkan ke PPK/ULP untuk dilakukan pengadaan.

#### Pengadaan obat

Sosialisasi kebijakan pembelian obat berdasarkan nomor 63 Kemenkes RI tahun 2014 sudah ada di tangan pemerintah daerah, namun masih kurang karena peraturannya berubah setiap tahun. Permenkes RI nomor 5 tahun 2019 mengatur pengadaan obat secara menyeluruh dan memberikan kepastian bagi penanggung jawab pengadaan obat. Menurut penelitian Hafiz yang berjudul Pengaruh Sosialisasi Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Pemahaman Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris Kebijakan Pengampunan Pajak Pada UMKM Di KPP Pratama Semarang Tengah Dua), Sosialisasi Wajib Pajak dan Sosialisasi Wajib Pajak Memiliki Pemahaman dan Kepentingan Positif Secara Bersamaan. Dampak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak KPP Pratama Semarang Tengah Dua In dua.

Prasarana yang diperlukan untuk pembelian obat adalah ruangan tersendiri, komputer, printer, jaringan internet. Dinas Kesehatan Kabupaten Pelalawan sudah memiliki 1 (satu) unit komputer, 1 (satu) printer dan jaringan internet namun masih ada celah seperti ruangan tersendiri. Kemudian masih ada kekurangan komputer dan printer. Modem juga diperlukan untuk mengatasi jaringan yang lambat.

Saran apotek yang diterima dilihat dan dibedakan paket obat mana yang masuk dalam E-list dan mana yang tidak. Obat yang tidak ada dalam daftar atau tidak dapat diperoleh melalui pengadaan secara elektronik karena hambatan pelaksanaan pengadaannya dilakukan oleh UKPBJ melalui proses pengadaan lainnya. Prosedur ini sesuai dengan peraturan. Apabila obat yang diinginkan tidak tersedia dalam katalog obat elektronik atau pemasok tidak dapat menyediakannya, maka proses pengadaan dapat dilakukan dengan cara lain, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PPK dan otoritas pembelian bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan obat secara elektronik sesuai dengan nilai paket obat. Paket senilai hingga Rs 200 crore diatur oleh Otoritas Pengadaan. 11 Otoritas pembelian memperoleh paket obat sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan dalam pesanan pembelian.

#### Penerimaan Obat

Penerimaan dilakukan oleh tim penerimaan dan apotek kami sesuai dengan standar stabilitas dan penanganan obat, diikuti dengan konfirmasi cepat batch, ED, bentuk fisik obat, spesifikasi obat oleh SPK, dan kuantitas oleh SPP. Penerimaan meliputi konfirmasi bahwa jenis, spesifikasi, jumlah, tanggal pengiriman, dan harga produk obat dinyatakan dalam kontrak atau wajar sebelum produk obat disimpan dan didistribusikan. 12 Hal ini juga sesuai dengan Kriteria Penerimaan Jasa Kefarmasian yang diterapkan oleh KPPU.

Tempat penerimaan yang salah satu anggotanya adalah Apoteker yang bertugas mengontrol mutu obat yang diterima dan memeriksa label, kemasan, tanggal kadaluarsa dan nomor bets obat yang diterima. Jika obat yang dikirim tidak sesuai atau memiliki masa simpan yang sangat pendek dan tidak ada jaminan pengembalian, agen penerima akan mengembalikannya ke distributor. Mitra Penyalur memiliki waktu 20 hari kerja untuk menyelesaikan permintaan dalam satu jangka waktu SPP. Setelah obat diterima langsung diserahkan ke gudang apotek untuk disimpan.

#### Hambatan Penggunaan E-Katalog

Berdasarkan pengalaman penggunaan sistem e-katalog di RSUP Dr. Sardjito, sistem e-katalog diakui mudah dipelajari, namun sistem versi sekarang (versi 5) kurang user friendly dan lebih ribet, karena pada fitur filter tidak dapat mengganti penyedia melalui drop down setelah memilih salah satu, sehingga perlu dikembalikan ke awal terlebih dahulu. Serta sistem tidak otomatis menyesuaikan nilai RUP, sehingga perlu melakukan penarikan data master terlebih dahulu, ketika memasukan id RUP. Kemudahan penggunaan adalah aspek penting dalam sistem informasi. Persepsi kemudahan penggunaan merupakan keyakinan seseorang bahwa sistem informasi mudah digunakan dan tidak memerlukan usaha besar dari pihak pengguna.

Kemudahan ini akan dapat mengurangi energi, pikiran, dan waktu yang dihabiskan untuk menggunakan sistem informasi (Rijatullah *et al*,2020).

Selain hambatan teknis, masalah lain yang ditemui adalah e-katalog belum memuat seluruh obat yang ada di Formularium Nasional. Hambatan-hambatan yang ditemui dalam pengadaan melalui e-katalog, seperti server down ketika dibutuhkan, obat-obat yang turun tayang, dan ketersediaan obat di e-katalog menyebabkan sebanyak 21% jenis obat FORNAS tidak berhasil diadakan melalui e-katalog. Kemudahan penggunaan sistem serta keandalan sistem membentuk kualitas sistem informasi, yang bersama dengan kualitas informasi akan mempengaruhi kepuasan pengguna dan penggunaan sistem e-katalog. Hal ini akan mempengaruhi manfaat yang didapatkan dari penggunaan sistem informasi tersebut (Petter *et al*,2008).

## **SIMPULAN**

Penggunaan e-katalog bertujuan untuk mempermudah alur perencanaan, dan pengadaan obat akan tetapi hambatan teknis sering di temui dalam penggunaan nya seperti server down, obat-obat yang turun tayang, dan juga ketersediaan obat di e-katalog menyebabkan sebanyak 21% jenis obat Formularium Nasional tidak berhasil diadakan melalui e-katalog. Hal tersebut yang membuat penggunaan e-katalog masih di ragukan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Calipinar, H., & Soysal, M. (2012). E-procurement: A case study about the health sector in Turkey. *International Journal of Business and Social Science*, 3(7).
- Kementerian Kesehatan RI. Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Kefarmasian Di Rumah Sakit. 2019.
- Muhammad, Mukmin. 2017. Perencanaan Pembangunan. Makassar: Cv. Dua Bersaudara
- Nugroho, A. 2012. *Cost effectiveness Analysis Pengadaan Obat Antibiotik Kelompok A Dengan Cara RSUD Dokter Soedarso Pontianak dan Metode EOQ DI RSUD Dokter Soedarso Pontianak*. Depok. Universitas Indonesia.
- Petter S, DeLone W, McLean E. Measuring information systems success: Models, dimensions, measures, and interrelationships. *Eur J Inf Syst*. 2008;17(3):236–63.
- Permenkes RI, 2016. Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 73 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek.
- Permenkes RI, 2014. Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 63 tahun 2014 tentang Pengadaan Obat Berdasarkan Katalog Elektronik.
- Rijatullah R, Suroso A, Rujito L. Pengaruh Persepsi Kemanfaatan dan Persepsi Kemudahan Penggunaan Terhadap Sikap Penggunaan Resep Elektronik. *J Ekon Bisnis dan Akunt*. 2020;22(2):217–32.